

## **Dimensi Internal Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

**Dina Ayu Lestari<sup>1</sup> Syamsuri Rahim<sup>2</sup>✉**

Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi internal auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Hipotesis penelitian ini adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan oleh Auditor Inspektorat Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden tentang pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Makassar dengan membagikan kuisisioner/lembar pernyataan kepada 36 sampel auditor akan tetapi hanya 29 kuisisioner yang dapat diolah. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan oleh Auditor Inspektorat Kota Makassar baik secara parsial maupun simultan.

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan, dan Laporan Keuangan.*

### **Abstract**

This study aims to analyze the internal auditor's dimensions in improving the quality of the Makassar City Government's financial reports. The hypothesis of this study is that supervision, control, and examination have a significant effect on the quality of financial statements by the Makassar City Inspectorate Auditor. The data used in this study is primary data from respondents' assessments of supervision, control, inspection, and quality of financial reports. This research was conducted at the Makassar City Inspectorate Office by distributing questionnaires/statement sheets to 36 auditors, but only 29 questionnaires could be processed. The data analysis method used multiple linear regression analysis, t-test, F test, and coefficient of determination. The study results found that supervision, control, and inspection had a significant and positive effect on the quality of financial reports by the Makassar City Inspectorate Auditor, either partially or simultaneously.

**Keywords:** *Supervision, Control, Audit, and Financial Report.*

Copyright (c) 2021 Syamsuri Rahim

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [syamsurirahim@umi.ac.id](mailto:syamsurirahim@umi.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dalam suatu pemerintahan dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang berkualitas. Dalam sebuah organisasi pemerintahan ataupun swasta,

laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk membantu para pengguna (masyarakat) agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan suatu entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Rahim, Ahmad, Thalib, & Thalib, 2019). Dalam konteks pemerintahan, Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh peran audit internal yang bekerja dalam penyusunan laporan keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas (organisasi, perusahaan, atau lembaga) sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Hal ini telah dijelaskan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Subtansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ini, Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun fenomena yang sering dijumpai saat ini adalah terkadang ditemukan perlakuan akuntansi yang tidak tepat pada komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi disetiap satuan kerja. Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka tata kelola keuangan tersebut harus dilakukan berdasarkan good governance yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut (Suwardjono, 2005).

Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka tata kelola keuangan tersebut harus dilakukan berdasarkan good governance yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut (Suwardjono, 2005). Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah

yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Agar laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka diharapkan laporan keuangan tersebut harus berkualitas. WTP adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit (Yuliani, Nadirsyah, & Bakar, 2010). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi (Roviyantie, 2011) serta Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan (Diani, 2014).

Beberapa hal penting terkait dengan hubungan dimensi internal audit dengan kualitas laporan keuangan, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan. Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat (sumbar) mendapat opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian) menurut Betty Ratna Nuraeni selaku Kepala Badan Keuangan (BPK-RI). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2012 (Hariansinggalang, 2013) 23 Agustus 2013. Isu penting lainnya tentang laporan keuangan pemerintah Indonesia adalah lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana dibuktikan oleh otoritas Biro Keuangan yang menemukan bahwa di antara 520 laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat 1.427 kasus kelemahan sistem tersebut. Kelemahan sistem terdiri dari 624 kasus sistem akuntansi dan 469 kasus sistem anggaran belanja. Kelemahan ini juga dikaji dan disorot oleh otoritas keuangan independen lainnya yang mengindikasikan adanya potensi kecurangan dalam pembelanjaan anggaran oleh pemerintah (Syamsuri Rahim, Ahmad, Thalib, & Thalib, 2014).

Salah satu daerah yang masih menjadi perhatian terkait penyusunan laporan keuangannya yang masih belum maksimal adalah daerah Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil temuan dari Badan Penyidik Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2012 dinilai melanggar aturan perundang-undangan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa pada tahun Anggaran 2012 terdapat 12 temuan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Polewali Mandar kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Sulawesi Barat. Tahun Anggaran 2015 Badan Penyidik Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar. Hal yang dikecualikan tersebut adalah berkaitan dengan penyajian Kewajaran Aset Tetap dalam laporan keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (BPK, 2015).

Berdasarkan kondisi riil yang ada, dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK yang mana terdapat 12 kabupaten/ Kota mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualiaan). Dimana kota Makassar dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 ke 2014 mendapat opini WDP dan di tahun berikutnya 2015, 2016, dan di 2017 meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP/DPP. Diharapkan kedepannya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar dapat ditingkatkan sehingga kualitas laporan keuangan yang diharapkan tercapai yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Tujuan peneliti melakukan penelitian pada kantor Inspektorat Kota Makassar adalah untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, serta melakukan review terhadap laporan keuangannya. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran internal audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Menurut The Institute of Internal Auditor (1999) telah melakukan redefinisi terhadap internal auditing, disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi (Yuliani et al., 2010).

Penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dilakukan pada pemerintah daerah yang dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kota Banda Aceh yang diteliti oleh (Yuliani et al., 2010). Penelitian juga dilakukan oleh (Permatasari, 2014) yaitu meneliti tentang pengaruh komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan dan menyatakan bahwa komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan serta penelitian yang dilakukan oleh (Nova, 2015) tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menyatakan bahwa Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nazaruddin & Syahrial, 2017), tentang pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pada pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel

independennya menjadi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan dalam dimensi internal auditor dan melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini membahas tentang Dimensi Internal Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, dimana faktor-faktor tersebut yaitu pengawasan dalam hal ini menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian intern tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas. Pemeriksaan diharapkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Dian, (2014) melakukan penelitian pada SKPD pemerintah daerah kota pariaman, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menentukan terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan semakin baik pengawasan dalam internal auditor maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

**H1:** Pengawasan dalam dimensi internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian (Rusvianto et al., 2018) pada SKPD Kota Bandung, hasil penelitiannya menyebutkan hasil uji statistik mengenai pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas kepercayaan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan". Jadi dapat disimpulkan semakin baik pengendalian dalam internal audit maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

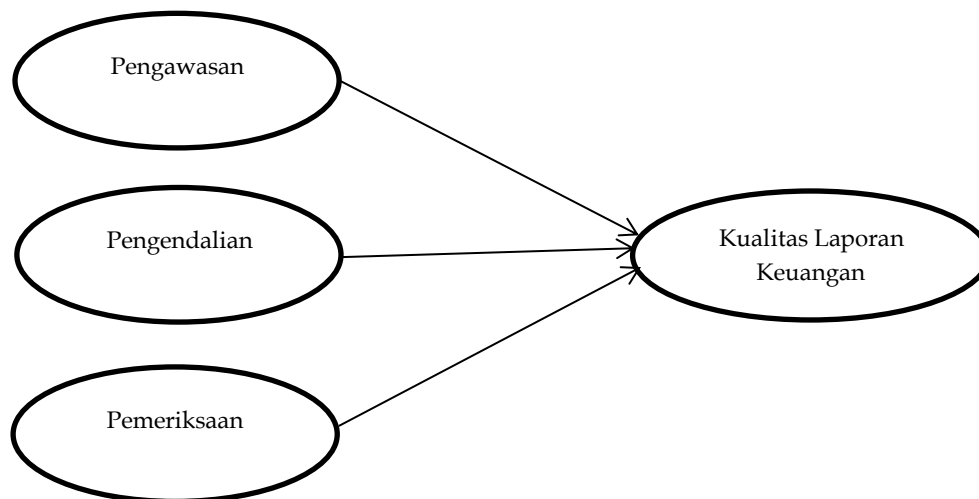
**H2:** Pengendalian dalam dimensi internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara opini pemeriksaan diberikan berdasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jika laporan keuangan suatu entitas telah memenuhi semua kriteria perumusan opini di atas, maka auditor berkewajiban memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian (Parwanto & Harto, 2017) pada BPK di Provinsi Jawa Tengah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel opini pemeriksaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu masalah keagenan yaitu asimetri dapat diatasi dengan adanya pemberian opini oleh BPK terhadap laporan keuangan. Opini pemeriksaan menggambarkan sejauh mana pemerintah dapat mengelola keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan kontrak yang berlaku antara pemerintah daerah dan DPR sebagai perwakilan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan semakin baik pemeriksaan dalam internal auditor maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

**H3:** Pemeriksaan dalam dimensi internal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Model penelitian disusun dan digambarkan serta menghubungkan antara dua variable independen dan variable dependen yang akan diuji dalam penelitian ini. Tiga variabel independent dalam penelitian ini adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan yang dihubungkan dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Model penelitian yang digambarkan atas gabungan variabel independent dan variabel dependen dapat dilihat pada gambar 1:



**Gambar 1. Model Penelitian**

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Makassar. Studi ini melibatkan 36 orang auditor yang terdiri dari Auditor Madya sebanyak 6 orang, Auditor muda sebanyak 18 orang, auditor pertama sebanyak 6 orang, auditor pelaksana lanjutan sebanyak 3 orang dan auditor kepegawaian pertama sebanyak 6 orang. Data dalam studi ini kami kumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden. Kemudian akan dianalisis dengan alat SPSS. Data

penelitian dianalisis melalui beberapa tahap pengujian seperti uji statistic deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, heterokedastisitas. Hipotesis akan diuji dengan pendekatan regresi berganda dan akan dianalisis menggunakan umji koefisien determinasi, uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-f). Persamaan regresinya adalah

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Laporan Keuangan  
 a : Konstanta  
 b : Koefisien arah regresi  
 X1 : Pengawasan  
 X2 : Pengendalian  
 X3 : Pemeriksaan  
 e : error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji kolerasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan pearson correlation. Butir pernyataan dikatakan valid apabila tingkat signifikannya dibawah 0,05. Berdasarkan table 1, nilai X1, X2, X3 dan Y sig. (2-tailed) < 0.05 maka kuesioner dinyatakan valid. Untuk mengetahui validitas pertanyaan dari setiap variabel, maka rhitung dibandingkan dengan r-tabel. r-tabel dapat dihitung dengan  $df = N - 2$ . Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 29, sehingga  $df = 29 - 2 = 27$ ,  $r_{27} = 0,311$ . Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

**Tabel 1. Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Keterangan
Pengawasan (X1)	X1.1	0,473 > 0,311	Valid
	X1.2	0,646 > 0,311	Valid
	X1.3	0,667 > 0,311	Valid
	X1.4	0,671 > 0,311	Valid
	X1.5	0,734 > 0,311	Valid
	X1.6	0,635 > 0,311	Valid
Pengendalian (X2)	X2.1	0,701 > 0,311	Valid
	X2.2	0,672 > 0,311	Valid
	X2.3	0,844 > 0,311	Valid
	X2.4	0,817 > 0,311	Valid
	X2.5	0,793 > 0,311	Valid
	X2.6	0,830 > 0,311	Valid
Pemeriksaan (X3)	X3.1	0,874 > 0,311	Valid
	X3.2	0,791 > 0,311	Valid
	X3.3	0,887 > 0,311	Valid
	X3.4	0,827 > 0,311	Valid
	X3.5	0,739 > 0,311	Valid
Deteksi Potensi Kecurangan (Y)	Y1	0,757 > 0,311	Valid
	Y2	0,652 > 0,311	Valid
	Y3	0,668 > 0,311	Valid
	Y4	0,879 > 0,311	Valid
	Y5	0,913 > 0,311	Valid

Y6

0,860 &gt; 0,311

Valid

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan	0,844	Baik
Pengendalian	0,717	Cukup
Pemeriksaan	0,743	Cukup
Kualitas Laporan Keuangan	0,714	Cukup

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pernyataan yang diberikan, menggunakan metode statistic Cronbach's Alpha dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ( $>$ ) 0,6. Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa item pernyataan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pernyataan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan normal probability plot tidak miring ke kanan maupun ke kiri sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kualitas pelaporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Jika  $VIF > 10$  dan nilai tolerance  $< 0.10$  maka terjadi multikolinieritas. Dibawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Data pada table 3 menunjukkan bahwa semua nilai VIF variabel independennya berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance dan VIF)**

Variabel	Collinearity Statistics			
	Tolerance		VIF	
	Hasil	Simpulan	Hasil	Simpulan
Pengawasan	0.079	$< 0.10$	2.647	$< 10$
Pengendalian	0.795	$> 0.10$	2.021	$< 10$
Pemeriksaan	0.093	$< 0.10$	2.777	$< 10$



Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual data pengamatan kepengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Pada penelitian ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik dimana jika ada titik pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas, bawah, samping kiri dan kanan serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan pada grafik menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan berdasarkan variabel independennya.

Setelah dilakukan pengujian apakah data layak digunakan atau tidak dan hasil uji mengatakan data layak digunakan maka pengujian selanjutnya adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen (dimensi internal audit dan pemahaman akuntansi) cara melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji F, dan uji t.dari perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan SPSS didapatkan.

**Tabel 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R-Square	Std Error of the Estimate
1	.728 <sup>a</sup>	.530	.473	.39584

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0.473 atau 47.3% ini berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 47,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji simultan (Uji-F) untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas (pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan) terhadap variabel terikat (kualitas laporan keuangan) adapun hasil Uji F dapat dilihat pada table 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.408	3	1.469	9.378	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3.917	25	.157		
	Total	8.326	28			

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diolah dengan menggunakan SPSS adalah sebesar  $0.000 < 0.05$ . ini berarti bahwa variabel independen (pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Makassar. Tahap selanjutnya adalah pengujian secara parsial (Uji-t) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai  $< 0.05$  maka H<sub>a</sub> diterima dan jika nilai  $> 0.05$  maka H<sub>a</sub> ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variabel	Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
----------	-----------------------------	------	------------

	B	Std. Error	Hasil	A = 5%	
Pengawasan	.302	.079	0.006	< 0.05	Berpengaruh Signifikan
Pengendalian	.569	.121	0.000	< 0.05	Berpengaruh Signifikan
Pemeriksaan	.274	.141	0.040	< 0.05	Berpengaruh Signifikan

## Pembahasan

### Pengaruh Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan atau controlling sangat penting untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah, PAD dengan sistem pengelolaan yang baik maka suatu organisasi atau pemerintah bisa terukur dan berorientasi pada kinerja. Menurut (Manullang, 2006) menjelaskan bahwa pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, karena pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Pengawasan dalam penelitian ini diukur menggunakan tiga indikator yaitu: evaluasi laporan, menetapkan alat ukur dan melakukan tindakan perbaikan. Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar dan hubungannya positif. Pengaruh antara pengawasan dengan kualitas laporan keuangan adalah semakin baik pengawasan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Haza, 2015), pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pengawasan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti pengawasan merupakan factor penentu baik dan tidaknya kinerja auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan auditor di lingkup Pemerintahan Kota Makassar sangat berkualitas dengan materi yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini yang menyebabkan pengawasan memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Haza, 2015), (Anggaraeni, Purnamawati, & Atmadja, 2015), (Sholikah, Astuti, & Susnarko, 2016), (Anshori, 2012), (AMRIANI, 2018) yang menemukan pengawasan berkontribusi dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### Pengaruh Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian dalam penelitian ini diukur menggunakan lima indikator yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Hasil uji statistik mengenai pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa penerapan system pengendalian

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Penerapan untuk dimensi pengendalian dalam Pemerintahan Kota Makassar sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Pengendalian yang baik dapat dilihat diterapkannya bentuk structural entitas yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga pembagian tanggung jawab yang jelas di dalam entitas pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Faishol, 2016), pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Sementara itu berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pengendalian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan auditor di lingkup Pemerintahan Kota Makassar sangat berkualitas dengan materi yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini yang menyebabkan pengendalian memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari Faishol (2016), Aditya & Surjono (2019), Sholehah, Rahim, & Muslim (2018) yang menemukan pengendalian berkontribusi dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki potensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ada (Mardiasmo, 2002). Pemeriksaan dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indikator yaitu: independensi audit internal, kompetensi audit internal, ruang lingkup audit internal, pelaksanaan audit internal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai t-statistik dibawah 5% dengan nilai koefisien 0,040 hal ini dapat dikatakan bahawa hipotesisi diterima dan menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu berdasarkan hasil uji parsial diketahui bahwa pemeriksaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan auditor di lingkup Pemerintahan Kota Makassar sangat berkualitas dengan materi yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini yang menyebabkan pemeriksaan memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Djanegara, 2017) yang menemukan pemeriksaan berkontribusi dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

#### SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pengawasan yang efektif dan efisien dalam pengeloaan keuangan maka akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Berarti pengawasan adalah faktor pendukung dan faktor penentu baik dan tidaknya peningkatan kualitas laporan keuangan oleh auditor di Pemerintahan Kota Makassar. Pengendalian yang dilakukan auditor dilingkup Pemerintah Kota Makassar sangat berkualitas, hal ini yang menyebabkan pengendalian memiliki kontribusi dalam mengembangkan kemampuan auditor terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem

pengendalian yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Pemeriksaan yang dilakukan auditor sangat berkualitas sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti pemeriksaan adalah faktor pendukung dan faktor penentu baik dan tidaknya peningkatan kualitas laporan keuangan oleh auditor di Pemerintahan Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menyarankan agar auditor di Inspektorat Kota Makassar untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan system pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan agar pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi andal dan tepat waktu. Untuk penelitian selanjutnya, Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada auditor yang bekerja di Inspektorat Kota Makassar. Disarankan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini, agar lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mutu kinerja auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Auditor terkait untuk lebih meningkatkan kinerja yang berkualitas. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.

## Referensi :

- A, A. A., & James, L. K. (2000). *Auditing, An Integrated Approach* (Edisi: 8th). Prentice Hall International.
- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Sikap*, 4(1), 80-94.
- AMRIANI, W. (2018). Pengaruh Pengawasan Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Penerapan Akrua Basis Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Kep. Selayar. *Photosynthetica*, 2(1), 1-13.
- Anggaraeni, M., Purnamawati, I. G. A., & Atmadja, A. T. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada 15 Dinas di SKPD Kabupaten Badung). 3(1).
- Anshori, M. A. (2012). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bantul). (12), 66-77.
- BPK. (2015). *IHPS I Tahun 2015*.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4742>
- Djanegara, M. S. (2017). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 461. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.252>
- Faishol, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan). I(3), 205–212.
- Hariansinggalang. (2013). Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat (sumbar).
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–19.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revi)*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazaruddin, & Syahrial. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3, 105–120.
- Nova, W. S. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Artikel Ilmiah*, 2(2), 1–27.
- Permatasari, T. M. (2014). Pengaruh Komitmen Karyawan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kota Pasuruan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahim, S., Ahmad, H., Thalib, M. K., & Thalib, J. A. (2019). The effect of human resource competency, communication, and technology on government's statement. *Opcion*, 35(90–2), 507–523. Retrieved from <http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/30591>
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dk*, 53(9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sholehah, N. L. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Gorontalo). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.62>
- Sholikah, R. N., Astuti, D. S. P., & Susnarko, M. R. (2016). Pengaruh Pegawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(April), 168–175.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Ketiga; UGM, Ed.)*. Yogyakarta: BPFE.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.